

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan bagi penulis terdapat beberapa perbandingan penelitian yang menjadi acuan dari penelitian berikutnya guna mengasalkan penelitian terbaru dengan melampirkan kajian terdahulu agar dapat memposisikan penelitian berikutnya dengan menunjukkan orisinalitas penelitian.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Jumrah Dalam Skripsinya	“Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan” (Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2018).	Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jumrah dalam skripsinya dengan judul “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan (Studi Terhadap Berkuasanya Bangsawan Bima di Pemerintahan)” memberikan penjelasan bahwa dominasi keturunan bangsawan dikancah perpolitikan tidak berhenti sampai saat ini. Keterlibatan keturunan bangsawan sebagai kaum yang mendominasi di Kabupaten Bima menjadi politik dinasti. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat monopoli kekuasaan bangsawan di pemerintahan pada konteks struktur kekuasaan., yang ditandai dengan adanya Sultan Abdul Kahir dalam politik local Bima. Dengan pengaruhnya, dapat membuka ruang dominasi bangsawan politik local. Kemudian muncul Fery Zulkarnain pada mulanya menjadi pemimpin DPRD Bima dan kemudian menjadi bupati yang dipilih oleh masyarakat pada pemilihan umum 2005 dan pemilihan pada tahun 2010 juga. Hal ini mengakibatkan terbukanya dominasi bangsawan dalam ranah politik local, yang dimana sampai dengan struktur DPRD terdapat Dinda Damayanti Putri yang merupakan istrinya sendiri. Di lain hal terdapat pula saudaranya yang mengisi birokrasi DPRD. Hal ini dapat

		mempengaruhi pusat bisnis local di Bima karena kekuasaan yang dimiliki oleh kaum bangsawan.
Arianto Dalam Skripsinya	Kekuasaan dan Lgitimasi (Studi tentang Dominasi Kekuasaan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar)	Dalam penelitiannya, dijelaskan adanya kekuasaan Sayyid yang mendominasi di Desa Cikoang tepatnya di Kabupaten Takalar dengan masyarakat yang memiliki penerimaan serta pengakuan apa yang menjadi kekuasaan dari Sayyid. Dengan hasilnya menimbulkan dominasi terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Sayyid dari tiga ranah. pertama, berkuasahnya dalam ranah kontestasi Pilkades di Desa Cikoang, kedua sebagai kalangan elit kelas atas, kemudian yang terakhir terdapat tradisi serta religiusitas sebagai pemegang kekuasaan Sayyid. Dan kekuasaan yang ia miliki mendapatkan pengakuan dari setiap masyarakat lewat terpilihnya Sayyid sebagai kepala Desa Cikoang selama puluhan tahun.
Pawennari Hijjang dan Lia Amelia Dalam Jurnalnya	Assajingeng: politik kekerabatan di pilkada kabupaten bone (analisis antropologi politik). Jurnal socius. Vol.6 no.2 tahun 2019.	Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang telah dilakukan oleh Pawennari Hijjang dan Lia Amelia dalam jurnalnya yang berjudul “Assajingeng: Politik Kekerabatan di PILKADA Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik)” menjelaskan bahwa berdasarkan metode analisis kualitatif dengan pedekatan wawancara, terdapat suatu system kekerabatan serta adanya stratifikasi social yang bisa menyentuh budaya politik di Kabupaten Bone terkhususnya pada kaum bangsawan. Sebagai symbol warisan dan pola pengelompokan yang terjadi di Kabupaten Bone di zaman dahulu masih memiliki dampak pada perilaku politik masa kini. Pengelompokan ini dipengaruhi karena adanya bentuk kekerabatan dari kaum bangsawan yang memiliki identitas budaya. Di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adanya kekuatan politik dari kelompok yang biasanya disebut arung, atau kata lainnya adalah bangsawan. Assajingeng yang disebut sebagai pola kekerabatan. Pilkada yang menjadi tempat berpolitiknya kelompok bangsawan dengan pola kekerabatan sebagai strategi pemenangan. Kemudian strategi ini menjadi alat politik kekuasaan yang kemudian diberikan ke daerah.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1 Grand Teori Elite Gaetano Mosca

Terdapat kepercayaan bahwa lapisan masyarakat diperintah dari kelompok kecil orang dengan kapasitas-kapasitas yang dibutuhkan dihadapan mereka dengan adanya struktur social serta politik yang bersifat penuh. Dengan jangkauan terhadap pucuk kekuasaan merupakan hal yang sangat baik. Itulah yang disebut sebagai elit dengan menggolongkan dua kelas. Diantaranya, yang pertama terdapat lapisan atas yakni elite yang terbagi lagi menjadi yang memerintah dan tidak memerintah. Dan kemudian lapisan kedua yaitu lapisan yang paling rendah atau tidak terkategori sebagai elite.

Jika dipelajari dengan rinci dari teori elite ini maka kita akan mengetahui bahwa teori elite sekaligus juga menjelaskan teori kelompok, seperti teori elite menegaskan ialah yang bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup: (1) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan (2) sejumlah besar massa yang dihadirkan untuk diperintah. Jadi teori kelompok ini juga menegaskan bahwa politik juga dapat dipahami dalam konteks interaksi berbagai kelompok. Karena itu teori kelompok bisa saja digunakan dalam menjelaskan secara baik tentang fungsi-fungsi negara dan masyarakat. Serta teori kelompok dan elite ini juga menunjukkan pemahaman akan realitas kekuasaan merupakan tujuan utamanya.

Mosca adalah sosiolog yang mengkaji kelas sosial (elite) dengan tesisnya yang terakumulasi pada dua konsepsi tipologi kelas yaitu elite dan massa, yang mana menurut Mosca, tipologi adalah suatu keniscayaan dari realitas sosial. Di dalam kehidupan masyarakat meliputi masyarakat yang terbelakang dan yang hampir tak menikmati fajar peradaban, hingga ke masyarakat yang paling kuat dan maju. Menurut Mosca, tentu akan memunculkan dua kelas manusia yaitu, kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai.¹

Tipe elite yang memerintah itu terbagi menjadi dua tipe elite yaitu, mereka yang memerintah dengan kelicikan dan yang memerintah dengan cara paksa. Di dalam usahanya untuk mengabsahkan ataupun merasionalkan penggunaan kekuasaan mereka, elite-elite ini melakukan penyerapan atau penggunaan mitos-mitos yang mereka ciptakan untuk mengelabui massa guna memperalatnya. Dengan kata lain, penyerapan adalah cara-cara dengan mana tindakan-tindakan yang ditentukan oleh residu dirumuskan guna memahami munculnya tindakan-tindakan yang logis. Ketertarikan Pareto dalam masalah ini, sebagaimana dia membahas keseimbangan sosial, menambah keyakinan Pareto akan pentingnya sirkulasi elite dari waktu ke waktu.

2.2.2 Relasi Elite dan Massa

Mosca mengetahui adanya klasifikasi masyarakat dari sisi (*rulling class*), kelompok yang berkuasa dan (*rulled class*), kelompok yang dikuasai. Kemudian Pareto memahami struktur masyarakat dibagi dari dua model yakni, elite yang memerintah disebut *governing elite* dan yang diperintah disebut *non governing class*,

¹ Kamaruddin Salim. 2019. *Sosiologi Politik*. Malang: Intrans Publishing. Hlm. 78

hal mana dalam kelas atau penguasa yang mengendalikan kekuasaan disebut *rulling class*.²

Menurut Pareto, elite yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama, yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Hal ini berbeda dengan Mosca, yang menyebutkan bahwa disetiap masyarakat yang terbentuk maka senantiasa muncul dua kelas, yakni pertama, kelas yang memerintah dan kedua yaitu kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, tapi memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang mana bersifat legal, *arbitrer* (sewenang-wenang), dan menggunakan kekerasan.³

Mosca memperkenalkan konsep subelite yang merupakan kelas menengah. Kelas menengah ini dianggap sebagai elemen vital dalam mengatur masyarakat. Menurut Mosca, stabilitas politik ditentukan oleh lapisan kelompok menengah ini. Sedangkan bagi Pareto, antara *governing elite* dan *non-governing elite* senantiasa berebut kesempatan untuk mendapatkan bagian kekuasaan sehingga terjadi sirkulasi antar elite. Setiap elite dapat bertahan apabila mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah. Tetapi, sirkulasi elite akan tetap berjalan karena secara individual seperti elite keturunannya maupun elite yang diangkat atau ditunjuk akan mengalami kemunduran sesuai dengan waktu atau sebab-sebab biologis.⁴

Terdapat perbedaan di dalam masyarakat misalnya perbedaan atas keunggulan yang dimiliki satu sama lain. Bagi masyarakat yang memiliki suatu keunggulan akan

² Ibid. Hlm. 91

³ Ibid. Hlm. 94

⁴ Ibid. Hlm. 95

dikategorikan dalam golongan elit. Gaetona Mosca beranggapan bahwa elit merupakan golongan maupun kelompok yang mempunyai keunggulan atau bisa disebut dengan superioritas jika diadakan perbandingan dengan golongan ataupun kelompok yang lainnya.⁵

Dalam kelompok elit yang berkuasa, distribusi kekuasaan harus terjadi. Terdapat beberapa model dalam melakukan distribusi kekuasaan di masyarakat salah satunya ialah model elitis. Model elitis berangkat dari pendapat Mosca tentang lapisan masyarakat, bahwa kelompok yang memerintah jumlahnya lebih sedikit, menjalankan fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati sejumlah keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan. Sementara kelompok yang diperintah, jumlahnya lebih banyak dan dikendalikan oleh kelompok yang memerintah dengan cara yang terkadang bersifat sah namun terkadang bersifat sewenang-wenang. Model ini mengasumsikan bahwa dalam masyarakat tidak pernah ada distribusi kekuasaan yang merata. Terdapat beberapa pendapat Mosca bahwa:⁶

1. Kekuasaan politik tidak didistribusikan secara merata,
2. Masyarakat hanya dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya,
3. Kelompok elit dapat mengatur kelangsungan hidupnya atau dikenal dengan istilah self perpetuating. Keanggotaan kelompok elit berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas. Pemimpin-pemimpin selalu memilih sendiri penggantinya dari kalangan istimewa yang hanya terdiri dari beberapa orang,

⁵ Haryanto. 1991. *Elit, Massa, dan Konflik: Suatu Bahasan Awal*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Sosial UGM. Hlm. 3

⁶ Ibid. Hlm. 67

4. Kelompok elit mempunyai sifat otonom, kebal akan gugatan dari luar kelompok, dan segala persoalan politik diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompok.

2.2.3 Konsep Demokrasi

Seiring perkembangan zaman, istilah demokrasi sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga masyarakat modern saat ini. Demokrasi ialah sebuah sistem pemerintahan yang turut melibatkan masyarakat dalam memberikan perintah lewat perantaranya yang bisa diartikan sebagai satu gagasan maupun pandangan dalam ranah kehidupan yang tentunya menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh warga Negara tanpa adanya perbedaan atas hak dan kewajiban satu sama lain.⁷

Keberadaan Pejabat-pejabat rakyat pada titik-titik kota ataupun desa memperjelas sebagai bukti adanya proses pembentukan keputusan yang hadir digengaman rakyat. Proses ini secara teoritis menjembatani kekurangan demokrasi perwakilan yang cuma membagi wadah sempit terhadap partisipasi rakyat. Belum juga pada saat delegasi-delegasi rakyat yang dipercaya justru melenceng dari amanah yang diberikan.⁸

Demokrasi memiliki makna dalam artian pemerintahan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk aktif dan andil dalam pengambilan keputusan lewat perwakilan-perwakilan rakyat yang berwenang, serta masyarakat memiliki persamaan baik dari segi hak maupun kewajiban dalam mendapatkan perlakuan yang

⁷ Riska Muazzinah. 2019. *KONSEP DEMOKRASI (Studi Komparatif Antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)*. Hlm. 7

⁸ Hari Zamharir dan Sahrudin Lubis. (2021). *DEMOKRASI PEMIKIRAN DAN PRAKTIK Studi Kasus Taiwan dan Venezuela*. Depok: PT. Ahad Media Komunika. Hlm. 87

sama sebagai warga Negara. Berdasarkan hal tersebut bahwa demokrasi dapat dikatakan sebagai metode maupun cara dalam mencapai suatu kehidupan yang berkualitas lewat demokrasi yang baik pula.

Demokrasi sebagai sistem saat ini telah menjadi terobosan dalam berbagai kegiatan bermasyarakat serta kehidupan bernegara. Bahkan demokrasi yang ada telah dijadikan sebagai **asas yang fundamental**. Demokrasi dalam lingkup Negara telah memberikan arah bagi setiap masyarakat dalam menjalankan sistem kenegaraan sebagai organisasi. Tentu harus ada pemahaman dan pengetahuan yang benar pada setiap warga Negara tentang demokrasi.

Demokrasi Indonesia ini dibuat melalui keuntungan Kedaulatan di semua lapisan sistem kesejahteraan Orde baru yang masih mengakar. Muncutnya kerangka politik baru yang dikenal sebagai reformasi, bisa saja membuat power politik untuk berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Kemudian, golongan ini menggunakan institusi demokrasi seperti partai politik dan parlemen sebagai alat perlindungan dan memperlebar kepentingan.⁹

Demokrasi yang dipakai di Negara Indonesia berdasarkan Pancasila masih dalam tahap perkembangan dan terdapat perbedaan penafsiran dan pendapat mengenai ciri dan cirinya. Namun yang tidak dapat disimpulkan adalah beberapa nilai dasar demokrasi konstitusional sudah jelas tertuang dalam UUD 1945 tanpa perubahan. Selain itu, UUD 1945 menyebutkan dua asas yang menjadi pedoman

⁹ Asran Jalal. (2018). Makalah. *Demokratisasi di Indonesia*. Hlm 5-6

ketentuan dalam Nota Penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu:

1. Indonesia merupakan Negara dengan landasan hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berlandaskan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berlandaskan dari kekuasaan semata (Machtsstaat).
2. Sistem Konstitusional, pemerintahan dilandasi oleh Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat mutlak (dengan kekuasaan tidak terbatas)

Dari kedua istilah Negara hukum dan tatanan konstitusional memperjelas bahwa demokrasi yang mendasari konstitusi 1945 yang tidak berubah adalah demokrasi konstitusional. Apalagi ciri demokrasi Indonesia berpedoman pada hikmat musyawarah perwakilan, yang terdapat pada UUD.¹⁰

2.2.4. Dinasti Politik

Dinasti politik yang ada pada dunia politik terkini, diketahui sebagai elit dengan landasan yang berasal dari ikatan darah maupun berasal dari perkawinan dengan tujuan kepentingan politik, yang kemudian dianggap dari beberapa pengamat sebagai oligarki politik dalam sistem pemerintahan. Kalangan elit yang ada di Indonesia merupakan kalangan yang mempunyai suatu kelebihan dalam memberikan pengaruh terhadap pengambil keputusan politik. Karena hal tersebut, mereka sebagai kelompok elit dapat dengan mudah mengakses kekuasaan maupun berkontestasi dalam memperebutkan kekuasaan. Awal mula adanya keberadaan dinasti politik, kalangan elit itu dibentuk elit dari partai politik, elit pemodal, elit penguasa maupun

¹⁰ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 106

elite lainnya. Adanya dominasi yang menyumbat setia pos-pos jabatan politik resmi dipandang tidak tepat bagi elit yang beragam. Namun, lebih baiknya apabila pikiran elit sendiri digerakkan dalam alur oligopoli.¹¹

Dapat dimaknai dalam artian pengawasan pada sumber kekuasaan tetap digerakkan akan tetapi dengan mengundang pula pelopor yang lainnya untuk ikut terlibat dalam jejaring elit tersebut. Pada dasarnya elit memiliki sifat yang umum serta mengalami pergantian pada setiap fase fungsional di Setiap fase fungsional pada proses pembentukan keputusan serta peranannya bisa meningkat maupun menurun bergantung pada situasi yang ada. Artinya status elit bukan merupakan suatu yang bersifat tetap yang diperoleh pada suatu hubungan yang ditandai, melainkan bisa menempel kepada siapapun yang secara tidak sengaja memiliki peran yang penting. Dinasti politik mencuat sebagai tradisi yang berasal dari warisan pemilik modal yang selalu melekat kuat di tengah-tengah masyarakat. Pemilik modal bukan saja diartikan sebagai penguasa atas ekonomi yang ada, namun juga membentuk suatu jaringan yang loyal dalam masyarakat dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh yang resmi.¹²

Timbulnya dinasti politik bisa terjadi disebabkan adanya kolusi antara bisnis dan politik di ranah lokal. Artinya jaringan keluarga yang sudah berkuasa terhadap pembangunan daerah kemudian diberikan kepada kolega-koleganya. Dinasti politik memiliki peran menjadi acuan dalam mempertahankan stabilitas dari kolusi yang ada dengan memposisikan setiap keluarganya ke setiap struktur pemerintahan. Semakin erat korelasi antara kekeluargaan dengan kekuasaan sehingga agak sulit untuk

¹¹ Winda Roselina Effendi. *DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN LOKAL STUDI KASUS DINASTI KOTA BANTEN*. Dalam Jurnal Trias Politika. Volume 2 Nomor 2. Oktober 2018. Hlm. 6

¹² Ibid. Hlm. 7

membedakan kedua hal tersebut. Di dalam budaya masyarakat begitu banyak dijumpai terkait hadirnya kekuasaan yang selalu di sejajarkan dengan kekerabatan, hal ini bisa disaksikan dari jenis budaya masyarakat pada suatu kelompok politik.¹³

Sama seperti keturunan yang berasal dari garis patrilineal serta matrilineal terkhususnya dalam menciptakan kewarganegaraan pada masyarakat yang didasari pada hubungan dan golongan-golongan yang disusun dengan tajam sehingga seakan berbeda dengan kekerabatan dalam makna yang sebenarnya. Kemudian pada masyarakat segmenter terdapat status perbudakan yang dimaknai dan pemaknaan pengucilan berasal dari garis keturunan serta menarik bagian otoritas dari kehidupan masyarakat.¹⁴

Kekerabatan adalah bagian-bagian sosial yang memiliki hubungan darah maupun hubungan dalam hal perkawinan. Pada sistem kekerabatan, terdapat penjelasan bahwa bukan cuma sekedar perkara adanya hubungan keluarga maupun hubungan perkawinan namun tidak lain karena adanya hubungan darah yang terjalin. Sementara itu sistem perkawinan bukan didasari oleh hubungan darah namun berasal dari golongan keturunan yang dikenal dengan istilah (linege) atau garis keturunan (descent).¹⁵

Kekerabatan selalu bergandengan bersama dengan kekuasaan menjadikan kekuasaan dilihat berdasarkan fenomena yang ada pada proses politik. Di era modern ini berbagai aktor dalam politik membuat suatu tradisi atau kebiasaan dalam mengikutsertakan keluarganya untuk terjun ke dunia politik dan hal tersebut bisa

¹³ Ibid.

¹⁴ Georges Balander. 1996. *Antropologi politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 65

¹⁵ M. Setiadi Elly dkk. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 93

dilihat dari berbagai daerah pada konstelasi politik terkhususnya pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di akhir-akhir ini.¹⁶

2.3. Kerangka Pemikiran

Sampai kapan pun budaya politik tidak akan bisa lepas begitu saja ditengah masyarakat. Terkhususnya nilai budaya politik yang ada pada masyarakat Kabupaten Bone. Bangsawan yang telah hadir dari zaman kerajaan Bone memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemerintahan Kabupaten Bone. Semenjak berakhirnya orde lama, orde baru, sampai dengan saat ini era reformasi dengan penerapan system demokratis dengan perkembangan pesat sehingga penulis memiliki keinginan dalam melaksanakan penelitian terkait dominasi politik bangsawan yang masih menjadi budaya politik di Kabupaten Bone.

Guna dalam mempermudah kajian penelitian penulis terkait focus pembahasan dengan judul “POLITIK DINASTI DI KABUPATEN BONE (Studi Kasus: Dominasi Politik Arung, Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Bone Tahun 2008-2018) tentu diperlukan penjabaran terkait kerangka pemikiran penulis yang berupa variable pembahasan berbentuk gambar atas apa yang terjadi dilapangan dengan menggunakan teori yang relevan atau berkaitan dengan topik permasalahan yang ada.

¹⁶ Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 71

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

